Konglomerat Jepang Investor Baru Amar Bank

JAKARTA, ID – PT Bank Amar Indonesia Tbk mengumumkan bahwa SBI Holdings, Inc, konglomerat jasa keuangan asal Jepang resmi menjadi salah satu pemegang saham di Amar Bank. SBI Holdings memegang 5,63% saham Amar Bank, dan menjadi pemegang saham institusional terbesar ketiga setelah Tolaram Pte.Ltd (Tolaram) dan PT Jagat Raya Imajinasi.

Langkah strategis ini menandai babak baru dalam perjalanan pertumbuhan Amar Bank, sekaligus mencerminkan kepercayaan investor global terhadap masa depan industri perbankan digital Indonesia. Presiden Direktur Amar Bank Vishal Tulsian mengaku sangat antusias menyambut kehadiran SBI Holdings sebagai bagian dari Amar Bank dan berharap dapat bekerjasama erat dalam membuka berbagai peluang baru.

"Melalui kemitraan ini, kami berkomitmen untuk dapat menjalin kolaborasi dengan perusahaan di bawah naungan mereka, serta memanfaatkan ekosistem layanan keuangan SBI yang kuat untuk saling berbagi keahlian, membangun sinergi, dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi segmen ritel dan UMKM di seluruh Indonesia," jelas Vishal dalam keterangannya, Kamis (9/10/2025).

Sementara itu, *MD, Fintech & Infrastructure of* Tolaram Navin Nahata menambahkan, sebagai pemegang saham pengendali Amar Bank, pihaknya percaya bahwa hadirnya SBI Holdings ke jajaran pemegang saham semakin memperkuat validasi strategi dan misi Amar Bank untuk merevolusi layanan perbankan untuk nasabah retail dan UMKM.

Dengan menggabungkan seluruh kapabilitas dan keahlian masing-masing, pihaknya yakin langkah ini akan semakin mempercepat peta jalan Amar Bank. "Serta mendukung upayanya untuk memperluas akses, meningkatkan pengalaman nasabah, dan menciptakan dampak berkelanjutan bagi segmen ritel dan UMKM di Indonesia," tutur Navin.

Disokong oleh mitra global dan lokal yang kuat, Amar Bank tetap berkomitmen untuk mendorong inovasi, memperluas inklusi keuangan, dan menciptakan dampak berkelanjutan bagi nasabah ritel serta pelaku UMKM yang belum terlayani secara optimal di Indonesia. **(nid)**

IST

Penukaran Uang Rupiah di Wakatobi Wave 2025

Petugas Bank Indonesia memberikan uang rupiah baru ke masyarakat di loket penukaran uang rupiah di Wakatobi Wave 2025 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, baru-baru ini. Layanan penukaran uang rupiah merupakan wujud komitmen Bank Indonesia dalam memberikan layanan kas yang prima, agar masyarakat semakin mudah untuk memperoleh uang rupiah layak edar dalam jumlah yang cukup dan pecahan yang sesuai.

Kredit Tersengat Likuiditas dari Pemerintah

JAKARTA, ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penempatan dana pemerintah kepada lima bank memberikan dampak terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang lebih tinggi dari kredit. Hal ini tentunya dapat memacu penyaluran kredit ke sektor riil.

Oleh **Nida Sahara**

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, secara umum kinerja perbankan tumbuh positif, terlihat dari kredit yang tumbuh 7,56% secara tahunan (*year on year*/yoy) per Agustus 2025 menjadi Rp 8.075 triliun, lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 7,03% (yoy).

"Pada akhir September, DPK tercatat meningkat dari Agustus, DPK tumbuh lebih tinggi dari kredit. Sehingga, bank punya ruang lebih besar menyalurkan kredit ke depannya," kata Dian dalam konferensi pers, Kamis (9/10/2025).

Menurut Dian, langkah pemerintah menempatkan saldo anggaran lebih (SAL) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan BSI diharapkan bisa memberi ruang untuk menurunkan biaya dana (cost of fund). Pada akhirnya bisa menurunkan suku bunga kredit bank agar lebih kompetitif kepada pelaku usaha.

Umumnya, lanjut Dian, penurunan suku bunga kredit ada jeda waktu, sehingga masih ada ruang penurunan suku bunga, namun penurunannya tergantung struktur bank, seperti biaya dana bank. "Dengan beberapa bank masih banyak menggunakan dana mahal (deposito) karena DPK melambat, bank perlu kelola strategi meningkatkan porsi dana murah untuk menciptakan penurunan bunga kredit lebih signifikan," ucap dia.

Secara terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, hingga posisi 30 September 2025, dari penempatan dana Rp 200 triliun, telah tersalurkan Rp 112,4 triliun dari lima bank. Apabila dirinci, Bank Mandiri menjadi bank dengan penyalur kredit terbesar dari dana yang ditempatkan Rp 55 triliun, di mana 74% atau Rp 40,6 triliun telah dikucurkan ke sektor riil.

Kemudian, BRI telah menyalurkan dana Rp 33,9 triliun atau 62% dari penempatan dana Rp 55 triliun. Berikutnya, BNI mengucurkan Rp 27,6 triliun atau 50% dari penempatan dana Rp 55 triliun dari pemerintah. Lalu, BTN baru menyalurkan 19% atau Rp 4,8 triliun dari Rp 25 triliun dana yang ditempatkan. Serta BSI, telah merealisasikan 55% atau Rp 5,5 triliun dari dana Rp 10 triliun.

"BTN baru 19%, padahal dia ngomongnya paling kencang, Desember sudah habis duitnya, tapi nggak apa-apa, dampaknya positif," sindir Purbaya.

Menurut Purbaya, BTN dinilai tidak mampu menghabiskan penempatan dana sebesar Rp 25 triliun hingga akhir tahun ini. Dia memperkirakan dana yang akan terserap BTN hanya sekitar Rp 10 triliun. Dengan demikian, Purbaya berencana untuk mengambil Rp 15 triliun dari BTN dan menempatkannya ke bank lain. "Kecuali kalau dia besok hadap saya dan bilang sanggup," lanjut Purbaya.

Dia menyampaikan bahwa Bank Mandiri menjadi bank dengan penyaluran dana terbesar. Direksi Bank Mandiri pun sempat menanyakan penggunaan dana SAL tersebut kepada Purbaya. "Dia nanya ke saya, 'boleh nggak saya kasih pinjam ke properti dan otomotif?' Boleh saja sebetulnya, saya nggak ada urusan, asal jangan beli dolar, kalau beli, saya sikat," beber Purbaya.

Purbaya juga menyindir sejumlah ekonom yang menilai dirinya sembrono karena menempatkan dana ke bank sebesar Rp 200 triliun. Namun, dia menjelaskan bahwa hal tersebut bisa menciptakan permintaan (demand), lantaran bunga kredit akan lebih rendah dan bank juga bisa menekan biaya dananya.

"Mereka nggak ngerti, saya punya rekening di bank sentral, saya pindahkan sebagian di bank, nggak ada perubahan fiskal dan nggak ada perubahan apa-apa. Uang di bank ini nyebar ke ekonomi dalam bentuk kredit, dampaknya positif," urai dia.

Penempatan Dana ke BPD

Terkait rencana Menkeu Purbaya menempatkan dana SAL ke Bank Pembangunan Daerah (BPD), antara lain Bank Jakarta dan Bank Jatim. OJK menyambut baik rencana tersebut supaya likuiditas bisa mengalir ke daerah-daerah yang mengalami kesulitan dana.

"Wacana penempatan dana pemerintah ke BPD, sebenarnya positif ini meningkatkan likuiditas BPD dan tentu dia akan dioptimalkan untuk mendorong pertemuan ekonomi di daerah. Ini mungkin salah satu hal yang agak positif yang mungkin timbul," tutur Dian.

Namun, Dian membeberkan bahwa data OJK per Agustus 2025 menunjukkan bahwa kondisi likuiditas BPD sebetulnya masih sangat memadai. Tercermin dari *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) 217,65% dan rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) sebesar 14,92%. Kemudian Alat Likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 30,1%. "Nah ini sebetulnya mencerminkan bahwa secara agregat tidak terdapat indikasi permasalahan di likuiditas BPD," imbuhnya.

Sementara itu pada sisi intermediasi LDR BPD secara agregat sebesar di 78,70%. Ini mencerminkan ruang ekspansi kredit BPD lebih tinggi dibandingkan dengan industri perbankan secara umum dengan LDR sebesar 86,03% per Agustus.

"Jadi ruangnya sebenarnya lebih luas di BPD. Kemudian guna menjaga agar wacana kebijakan pemerintah itu dapat berjalan efektif, tentu saja BPD agar senantiasa menguatkan infrastruktur baik dari sisi SDM, kebijakan, dan juga menurunkan risiko," tuturnya.

Beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah ketika akan memberikan guyuran dana kepada BPD, seperti aspek pricing. Dengan demikian tingkat suku bunga yang diharapkan ini turut menurunkan biaya dana, sehingga biaya kredit juga turut menurun. Dia juga mewanti-wanti agar kebijakan ini dilakukan dengan jangka waktu yang panjang.

Sebelumnya, Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo mengaku masih belum menerima pemberitahuan secara resmi terkait rencana penempatan dana oleh Kemenkeu di Bank Jatim. Namun, perseroan menyambut baik dan siap untuk menyukseskan program pemerintah.

"Dengan adanya penempatan dana di Bank Jatim ini, nantinya akan kami salurkan melalui kredit di sektor produktif. Sehingga hal tersebut mampu menggerakkan rantai pasokan ekonomi dan pada akhirnya dapat berimbas pada pertumbuhan ekonomi," tutur Winardi kepada *Investor Daily*.

Pihaknya menegaskan bahwa rencana penempatan dana pemerintah ini akan dioptimalkan untuk meningkatkan kredit, terutama di sektor produktif. "Namun tentu saja, penyaluran kredit akan tetap dilakukan sesuai dengan aspek kehati-hatian dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku," jelas dia.

Adapun, per Agustus 2025 bank dengan kode emiten BJTM ini telah menyalurkan kredit dengan pertumbuhan 13,5% (yoy). Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit industri perbankan. Selain itu, Bank Jatim juga menjaga rasio dana murah tetap dominan, yakni 60,4% dari total DPK perseroan.

Intermediasi Perbankan

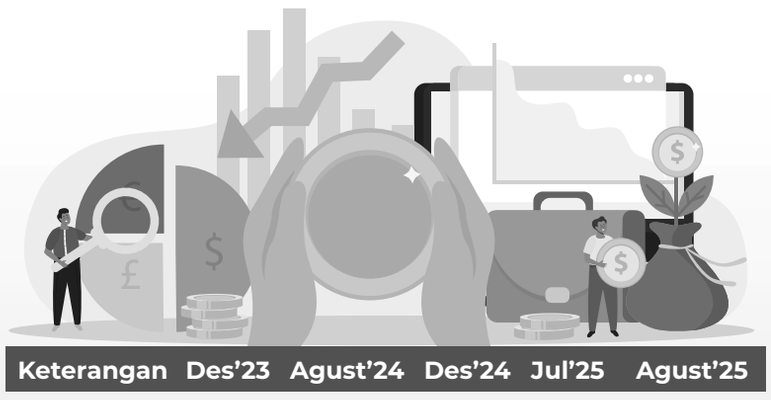

Keterangan	Des'23	Agust'24	Des'24	Jul'25	Agust'25
Kredit (Rp T)	7090	7508	7832	8043	8075
% yoy	10,38	11,4	10,46	7,03	7,56
% ytd	10,38	5,89	10,46	2,7	3,11
% mtm	1,79	-0,09	1,48	-0,21	0,4
DPK (Rp T)	8458	8650	8837	9294	9386
% yoy	3,73	7,01	4,48	7	8,51
% ytd	3,73	2,27	4,48	5,17	6,21
% mtm	2,94	-0,42	0,02	-0,37	0,98
LDR (%)	83,83	86,8	88,62	86,55	86,05
CAR (%)	27,65	26,69	26,68	25,88	26,03
NIM (%)	4,87	4,6	4,62	4,57	4,59
ROA (%)	2,74	2,69	2,69	2,56	2,54
NPL Gross (%)	2,19	2,26	2,08	2,28	2,28
LAR (%)	10,94	10,17	9,28	9,68	9,73

SUMBER: OJK, DIOLAH

sinarmas multiartha

PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk
(Perseroan)

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (untuk selanjutnya disebut Rapat) di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 18 November 2025.

Sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, serta memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (**"OJK"**) No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15), pemanggilan untuk Rapat akan diiklankan dalam 1 (satu) Surat Kabar harian, situs web Perseroan www.smma.co.id situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web eASY.KSEI pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2025.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Usulan Para Pemegang Saham dapat dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (**"OJK"**) No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu Senin, tanggal 17 November 2025.

Jakarta, 10 Oktober 2025
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Direksi Perseroan